

Editor:

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum.

PENDIDIKAN & LATIHAN **KEMAHIRAN HUKUM**



Diterbitkan atas kerja sama dengan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang



PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

Copyright © 2015

15 x 23 cm; xii, 462 hlm

ISBN 978-602-422-281-9

Editor

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum.

Tim Penyusun

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

M. Tamudin, S.Ag., M.H.

Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum.

Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.

Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.

Dr. Febrian, S.H., M.S.

Yuswalina, S.H., M.H.

Dr. Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.

Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Dicetak oleh:

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

EDITOR:

JUMANAH, S.H., M.H.

DR. H. PAISOL BURLIAN, M.HUM.



Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Romli SA., M.Ag.

(Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

Konsultan:

Dr. H. Marsaid, M.A.

Dra. Fauziah, M.Hum.

Drs. M. Rizal, M.H.

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum.

Narasumber:

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

Kapt. Kesmedi, S.H., M.Hum.

Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Dr. Febrian, S.H., M.S.

Yuswalina, S.H., M.H.

Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Dr. Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.

Editor:

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum.

**LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DEKAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Silabus Mata Kuliah	3
BAB 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	9
<i>Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. & Dr. Qodariah Barkah, M.Hl.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	9
B. Gugatan/Permohonan	9
C. Penerimaan Perkara/Pemanggilan Para Pihak	12
D. Permohonan Sita	18
E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara	31
F. Hal-hal yang Mungkin Terjadi pada Saat Sidang	36
G. Upaya Hukum	40
H. Eksekusi	44
BAB 3 HUKUM ACARA PIDANA	77
<i>Oleh: Jumanah, S.H., M.H. & Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	77
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	79
C. Tahap-tahap Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana	80

BAB 4 HUKUM ACARA PERDATA 135

Oleh: Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum. & Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

- A. Pengantar Teori Beracara Perdata..... 135
- B. Objek Hukum Acara Perdata 137
- C. Fungsi Hukum Acara Perdata 137
- D. Asas-asas Hukum Acara Perdata 138
- E. Jalannya Persidangan..... 142
- F. Macam-macam Upaya Hukum..... 156

BAB 5 HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 201

Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H.

- A. Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara..... 201
- B. Kekuasaan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 201
- C. Keputusan Tata Usaha Negara 202
- D. Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara..... 206
- E. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 211
- F. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 214
- G. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan..... 216
- H. Upaya Hukum 223

BAB 6 HUKUM ACARA PIDANA MILITER 233

Oleh: Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum. &
Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.

- A. Pendahuluan..... 233
- B. Militer Indonesia..... 238
- C. Sejarah Peradilan Militer 240
- D. Sistem Peradilan Pidana Militer..... 241
- E. Proses Penyelesaian Perkara 266
- F. Tata Ruang, Waktu, dan Tata Tertib Serta Pakaian Sidang di Lingkungan Peradilan Militer..... 275

BAB 7 TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK 283

Oleh: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum.

- A. Pengertian 283
- B. Jenis Kontrak 283

C. Syarat Sahnya Kontrak	284
D. Asas Hukum Kontrak.....	284
E. Bentuk-bentuk Kontrak.....	285
F. Kontrak Nominaat	286
G. Kontrak Innominaat	287
H. Susunan dan Anatomi Kontrak.....	288
I. Pola Penyelesaian Sengketa Kontrak.....	291
J. Berakhirnya Kontrak.....	291
K. Kontrak Leasing = Sewa Guna.....	292
 BAB 8 TEKNIK PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (TPUU)	 329
Oleh: Dr. Febrian, S.H., M.S. & Yuswalina, S.H., M.H.	
A. Hakikat Legislasi sebagai Aturan Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum (Pengantar)	329
B. Hakikat Legislasi	331
C. Proses Pembentukan	341
D. Bentuk Undang-Undang.....	373
E. Merumuskan Judul dan Konsiderans Undang-Undang	375
F. Penutupan	389
 BAB 9 PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (Alternative Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution)	 393
Oleh: Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si.	
A. Pendahuluan.....	393
B. Memilih Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan	397
 BAB 10 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 425
Oleh: Dhabbi K. Gumayra, S.H., M.H.	
A. Pengantar	425
B. Pengertian Hak Menguji.....	427

C. Sekilas Sejarah Hak Menguji di Indonesia	429
D. Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang	435
E. Hak Uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	441

PARA PENYUSUN

459

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laboratorium terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi. Laboratorium Terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Salah satu Laboratorium Terpadu yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah Laboratorium Terpadu Hukum.

Laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Terpadu Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar ia memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya Laboratorium Terpadu Hukum merupakan wujud aktual dalam menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena di Laboratorium Terpadu Hukum mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran menumbuhkembangkan minat dan bakat sebagai tenaga praktisi penegak hukum (*Law enforcement*) dan menjawab kebutuhan riil masyarakat pencari keadilan di berbagai lingkungan peradilan di Indonesia maupun di luar negeri.

Sangat kita sadari bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, untuk mewujudkan itu semua menekankan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (praktik) di Laboratorium Terpadu Hukum. Salah satu bidang keahlian yang dipraktikkan di laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini sangat diperlukan buku sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mempraktikkan materi yang telah tertuang dalam silabi matakuliah PLKH tersebut. Pembelajaran PLKH ini diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70% dengan harapan agar mahasiswa lebih banyak memiliki pengalaman praktik.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memahami hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

B. SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH : PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

KODE MATA KULIAH :

BOBOT SKS : 6

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama, teknik acara pidana, teknik acara perdata, teknik acara peradilan tata usaha negara, teknik acara peradilan militer, teknik perancangan kontrak, teknik perancangan perundang-undangan, teknik acara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR), teknik pengujian peraturan perundang-undangan dan mampu mengaplikasikannya dalam praktik.

Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi Dasar
1.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempraktikkan pembuatan surat kuasa, surat gugatan/permohonan. 2. Menjelaskan cara pemanggilan para pihak di persidangan. 3. Menjelaskan cara mediasi/perdamaian perkara di pengadilan agama. 4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. 5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata peradilan agama. 7. Membuat skenario persidangan kasus perdata peradilan agama. 8. Simulasi Sidang kasus perdata peradilan agama.
2.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempraktikkan pembuatan surat panggilan. 2. mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan. 3. mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka. 4. mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan. 5. Memahami acara persidangan kasus pidana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa. b. Panggilan sidang.

lanjutan...

		<ul style="list-style-type: none"> c. Pembacaan dakwaan. d. Eksepsi. e. Acara pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Formalitas persidangan; (2) Tahapan cara pemeriksaan persidangan; (3) Cara pengajuan keberatan; (4) mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli. f. Pembacaan tuntutan. g. Pledoi. h. Replik (oleh jaksa). i. Duplik (oleh terdakwa atau kuasa). j. Acara pembacaan putusan. k. Pengambilan putusan. l. Menyatakan banding.
3.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara perdata.	<ul style="list-style-type: none"> 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana. 8. Membuat skenario persidangan kasus pidana. 9. Simulasi sidang kasus pidana.
3.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara perdata.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa. 2. Menjelaskan macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i>. 3. Menjelaskan acara mediasi/perdamaian. 4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama. 5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata. 7. Membuat skenario persidangan kasus perdata. 8. Simulasi sidang kasus perdata.
4.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan tata usaha negara.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa. 2. Mempraktikkan pembuatan surat gugatan ke PTUN. 3. Menjelaskan pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan. 4. Menjelaskan cara pemanggilan sidang. 5. Menjelaskan proses atau tahapan pemeriksaan perkara TUN di pengadilan tingkat pertama. 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum dalam kasus TUN.

lanjutan...

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Menganalisis contoh-contoh kasus tata usaha negara. 8. Membuat skenario persidangan kasus tata usaha negara. 9. Simulasi sidang kasus tata usaha negara.
5.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan militer.	<ul style="list-style-type: none"> 1. mempraktikkan pembuatan surat panggilan. 2. mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan. 3. mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka. 4. mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan. 5. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana militer. 8. Membuat skenario persidangan kasus pidana militer. 9. Simulasi Sidang Kasus Pidana militer.
6.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian, syarat dan asas-asas kontrak bisnis. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk kontrak bisnis. 3. Menjelaskan tahapan pembuatan kontrak. 4. Menjelaskan anatomi kontrak. 5. Menjelaskan klausula kontrak yang spesifik. 6. Menjelaskan cara penyelesaian permasalahan dalam kontrak. 7. Mempelajari contoh-contoh dalam kontrak. 8. Mempraktikkan pembuatan suatu kontrak bisnis.
7.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Menjelaskan Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Menjelaskan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. 4. Menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 6. Menjelaskan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan.

lanjutan...

8.	Mahasiswa mampu menguasai teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian ADR/CDR. 2. Menjelaskan macam-macam penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan. 3. Menjelaskan pengertian arbitrase, dasar hukum, kewenangan arbitrase. 4. Menjelaskan cara pembuatan surat kuasa, surat gugatan ke badan arbitrase. 5. Menjelaskan tahapan/proses penyelesaian perkara melalui badan arbitrase. 6. Menjelaskan Eksekusi putusan badan Arbitrase. 7. Menjelaskan pengertian mediasi.
9.	Mahasiswa mampu menguasai teknik pengujian peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian Hak menguji. 2. Menjelaskan hak menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UUD. 3. Menjelaskan tahapan dan prosedur pengajuan, pemeriksaan dan putusan gugatan serta permohonan uji materiel. 4. Menjelaskan hak menguji UU terhadap UUD RI 1945. 5. Menjelaskan tahapan tata cara beracara dalam perkara pengujian UU terhadap UUD.

Deskripsi Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah		Pendidikan Kemahiran Hukum
A. Tujuan Pembelajaran		
01.	Pengetahuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan agama. b. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara pidana. c. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara perdata. d. memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan tata usaha negara. e. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan militer. f. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan kontrak. g. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan perundang-undangan. h. Memiliki pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR). i. Memiliki pengetahuan tentang teknik Pengujian Peraturan Perundang-undangan. 	

lanjutan...

02.	Sikap: a. Antusias mendalami bidang pendidikan latihan kemahiran hukum. b. Kritis dalam merespons setiap perkembangan permasalahan hukum.
03.	Keterampilan: a. Terampil dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang litigasi dan nonlitigasi. b. Terampil dan mampu memberikan solusi terhadap isu-isu permasalahan hukum.
B. Strategi	
01.	Strategi yang dipakai yakni: 1. Ceramah/kuliah tatap muka. 2. <i>Active debate</i> . 3. Penugasan (mandiri/kelompok). 4. <i>Case study</i> . 5. Strategi <i>synergic teaching</i> . 6. Presentasi. 7. <i>Reading guide</i> .
C. Evaluasi	
01.	Presentasi.
02.	Test Tertulis.
03.	Portofolio.
04.	Observasi.
05.	Performance.
D. Referensi	
BUKU: Abdul Manan. 2005. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i> . Jakarta: Prenada Media. ----- dan M. Fauzan. 2002. <i>Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i> . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Amran Muslimin. 1985. <i>Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi</i> . Bandung: Alumni. Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i> . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Miftah Thoha. 2005. <i>Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara</i> . Jakarta: Raja Grafindo Persada. M. Solly Lubis. 1977. <i>Landasan dan Teknik Perundang-undangan</i> . Bandung: Alumni. Mukti Arto. 1996. <i>Praktik Perkara Perdata</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. M. Yahya Harahap. 1993. <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i> . Jakarta: Pustaka Kartini.	

- , 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon et. al. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**HUKUM A
PERADILA**
Oleh: Dr. Arne H
Dr. Qodariah Ba

A. PENGERTIAN H

Hukum acara mengatur cara muka pengadilan bertindak untuk me-
tentu yang menjadi kom-
an, waris, hibah, wakaf, z
dalam Pasal 49 Undang-
adilan Agama.

B. GUGATAN/PERMOH

Gugatan ialah suatu per-
ketua pengadilan yang berwe-
dalamnya mengandung suatu
andasan pemeriksaan perkara
Permohonan ialah suatu p-
ak perdata oleh satu pihak yang
dak mengandung sengketa, seh-
pat dianggap suatu proses pera-

¹H. A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Per-
taka Pelajar*), hlm. 39. Baca juga M. Ya-
an Acara Peradilan Agama, (Jakarta: P
²Ibid dan Loc. cit. Yahya Harahap, hlm